

**PEMBAGIAN WARIS PADA KELUARGA BEDA AGAMA  
DI KEL. KALIPANCUR KEC. NGALIYAN SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu-Ilmu Syari'ah



**Oleh:**

**Muhammad Furqan Khafidli**

**NIM. : 2100076**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN WALISONGO SEMARANG**

**2007**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Muhammad Furqan Khafidli

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Furqan Khafidli  
Nomor Induk : 2100076  
Jurusan : AS  
Judul Skripsi : **PEMBAGIAN WARIS PADA KELUARGA  
BEDA AGAMA DI KEL. KALIPANCUR  
KEC. NGALIYAN SEMARANG**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, Juli 2007

Pembimbing,

**Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.**  
**NIP. 150 276 119**

**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**  
Jl. Raya Ngaliyan Boja Km. 02 Semarang Telp/Fax. (024) 601291

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Muhammad Furqan Khafidli  
NIM : 2100076  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : AS  
Judul : **PEMBAGIAN WARIS PADA KELUARGA BEDA  
AGAMA DI KEL. KALIPANCUR KEC.  
NGALIYAN SEMARANG**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**25 Juli 2007**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2006/2007

**Ketua Sidang,** Semarang, Juli 2006  
**Sekretaris Sidang,**

**Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.**  
**NIP. 150 254 348**

**Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.**  
**NIP. 150 276 119**

**Penguji I,**

**Penguji II,**

**Prof. Dr. HM. Muchojjar, HS, MA**  
**NIP. 150 110 554**

**Drs.H. Slamet Hambali**  
**NIP. 150 198 821**

**Pembimbing,**

**Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.**  
**NIP. 150 276 119**

## MOTTO

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا... (النساء: 141)

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin) (QS. al-Nisa: 141).\*

---

\*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an , *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1986, hlm. 103

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak Drs. Sutanto dan Ibu Afiyah) yang selalu mendo'akanku sehingga terasa ringan dalam menjalani hidup ini.
- Adik-Adikku tercinta (Lia dan Ima) yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
- Yang terkasih (Siti Nurul Aini) yang selalu menemaniku dalam suka dan duka dan selalu mendukung dan mensupportku dalam hidup ini.
- Serta seluruh keluarga ku tercinta yang selalu memberi semangat sehingga tersusun skripsi.
- Teman-temanku semuanya, senasib seperjuangan.

**Muhammad Furqan Khafidli**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

**Muhammad Furqan Khafidli**

## **ABSTRAK**

Dalam hubungannya dengan waris mewarisi pada keluarga beda agama, hal ini menunjukkan adanya anggota keluarga yang beragama Islam dan anggota keluarga yang beragama non Islam. Dalam kondisi seperti ini akan bersentuhan dengan persoalan waris beda agama bila pihak pewaris meninggal dunia. yang menjadi perumusan masalah yaitu apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena keluarga beda agama? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembagian waris pada keluarga beda agama di kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang?

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini bermaksud menggambarkan, memaparkan keadaan obyek penelitian, yaitu menggambarkan tentang pembagian waris pada keluarga beda agama di kel. Kalipancur kec. Ngaliyan Semarang.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan teori berdasarkan data dan pengembangan pemahaman dari hasil penelitian. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisa, dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian waris keluarga beda agama di antaranya: (1) Faktor pendidikan. Di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan bahwa pendidikan yang ditempuh oleh anak, remaja dan pemuda sangat beragam, namun pada umumnya mereka diberi kebebasan untuk memasuki sekolah-sekolah yang sesuai dengan minat anak. Pada umumnya mereka lebih banyak masuk sekolah-sekolah umum dengan pertimbangan bahwa lulusan dari sekolah umum lebih besar peluangnya untuk bisa diterima di perusahaan-perusahaan dibandingkan dengan sekolah-sekolah diniyah. (2) Faktor budaya. Masuknya budaya-budaya asing sangat mudah diapresiasi dan ternyata budaya asing lebih dominan menjadi pilihan mereka. (3) Faktor agama. Sikap keberagaman mereka sangat terbuka dan membuang jauh-jauh sikap fanatisme beragama. Dalam penelitian di kelurahan Kalipancur, berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu yang berjumlah 20 keluarga, dijumpai adanya keluarga yang antara anak dengan orang tuanya berbeda agama, yang satu Islam dan lainnya beragama Kristen, juga ada Hindu dan Budha. Satu hal yang menarik dari kehidupan keluarga itu yaitu pada waktu orang tua dari keluarga itu meninggal dunia ternyata ada pembagian waris dan waris itu di bagi-bagi tanpa membedakan agama.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pembagian waris yang antara anggota keluarga yang berbeda agama di Kelurahan Kalipancur itu sangat bertentangan dengan hukum Islam.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: **“PEMBAGIAN WARIS PADA KELUARGA BEDA AGAMA DI KEL. KALIPANCUR KEC. NGALIYAN SEMARANG”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Imron Rosyadi, M.Si. selaku Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staff, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibuku yang senantiasa berdoa serta memberikan restu nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

**Penulis**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12

### BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK WARIS KELUARGA

A. Pengertian Hukum Waris dan dasar Hukumnya .....	14
B. Syarat dan Rukun Waris .....	26
C. Faktor Penghalang Waris Mewarisi .....	31
D. Pendapat Ulama tentang Hak Waris Keluarga Beda Agama ..	40

### BAB III : GAMBARAN UMUM KELUARGA BEDA AGAMA TERHADAP HAK WARIS KELUARGA DI KEL. KALIPANCUR KEC. NGALIYAN

A. Letak Geografis Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang ..	49
B. Gambaran Umum Kehidupan Sosial Masyarakat Kel. Kalipancur .....	55
C. Pembagian Warisan Keluarga Beda agama	

di Kelurahan Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang .....	60
D. Kerangka Pikir Pembagian Harta Warisan .....	66

**BAB IV : HAK WARIS KELUARGA BEDA AGAMA DI KEL.  
KALIPANCUR KEC. NGALIYAN SEMARANG**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Pada Keluarga Beda Agama di Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang.....	69
B. Analisis Kerangka Pikir Pembagian Harta Warisan .....	78

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran-saran.....	87
C. Penutup.....	87

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Furqan Khafidli

Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 23 Desember 1981

Alamat Asal : Jl. Candi Mutiara Raya No. 1184 RT. 7, RW 7  
Pasadena Semarang

Pendidikan : - MI al-Khoiriyyah I, Semarang lulus th. 1994  
- MTs al-Khoiriyyah I Semarang lulus th. 1997  
- MAN I Semarang lulus th. 2000  
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang  
Angkatan 2000

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Muhammad Furqan Khafidli**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara pembagian waris berarti membicarakan *faraidh* atau kewarisan berarti pula membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian *fiqh Mawarits* mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.<sup>1</sup>

TM.Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan fiqh mawaris sebagai "ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya".<sup>2</sup>

Dalam istilah sehari-hari fiqh mawaris disebut juga dengan hukum warisan yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata fiqh mawaris. Bedanya, fiqh mawaris menunjuk identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan mempunyai konotasi umum, bisa mencakup hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata.

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 147

<sup>2</sup>TM.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm.

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Warisan di Indonesia* misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.<sup>3</sup>

Menurut Ahmad Rofiq beberapa pengertian yang dikemukakan para sarjana tentang fiqh mawaris dapat ditegaskan bahwa pengertian fiqh mawaris adalah fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara penghitungannya.<sup>4</sup>

Dalam hubungannya dengan keterangan di atas, dalam hukum waris Islam ada ketentuan halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawani' al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarris*. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu 1). Pembunuhan (*al-qatl*), 2). Berlainan agama (*ikhtilaf al-din*), 3). Perbudakan (*al-'abd*), dan yang tidak disepakati ulama adalah 4). Berlainan negara.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983, hlm.13

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.4

<sup>5</sup> Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981, hlm. 13.

Dalam hubungannya dengan waris mewarisi pada keluarga beda agama, maka ini menunjukkan adanya anggota keluarga yang beragama Islam dan anggota keluarga yang beragama non Islam. Dalam kondisi seperti ini akan bersentuhan dengan persoalan waris beda agama bila pihak pewaris meninggal dunia.

Dalam hukum Islam telah ditentukan bahwa berlainan agama bisa menjadi penghalang mewarisi. konkritnya apabila antara ahli waris dan *al-muwarris*, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarissnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan yang lain Syi'ah.

Dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (متفق عليه)<sup>6</sup>

Artinya: Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (Muttafaq 'alaih).

---

<sup>6</sup>Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al-babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 98

Hadits riwayat *Ashhab al-Sunan* (penulis kitab-kitab al-Sunan) yaitu Abu Dawud, al-Tirmizi, al-Nasa'i, dan Ibn Majah sebagai berikut:

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملّتين رواه احمد والاربعة والترمذى وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائ حديث أسامة بهد اللفظ<sup>7</sup>

Artinya: "dan dari Abdullah bin Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama (HR.Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nasa'i juga meriwayatkan dari Usamah bin Zaid).

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum ayat 141 surat al-Nisa' sebagai berikut:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا {141}...

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin) (QS. al-Nisa: 141).<sup>8</sup>

Nabi SAW. sendiri mempraktikkan pembagian warisan, di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW. meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi saw harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail dan Thalib.

<sup>7</sup>Al- Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as-Salmi at-Turmuzy, *Sunan at-Turmuzy*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931, 137. Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtima'iyah tth, hlm. 196.

<sup>8</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsisir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986, hlm. 103

Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu 'Ali dan Ja'far, oleh beliau tidak diberi bagian.<sup>9</sup>

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat muwarris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mati, dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama.<sup>10</sup>

Terhadap kesepakatan mayoritas ulama di atas, ternyata di Kelurahan Kalipancur Kec. Ngaliyan ada pembagian waris pada keluarga beda agama, dan berdasarkan hasil penelitian dan keterangan yang terdata di Kel. Kalipancur bahwa yang berstatus suami istri dengan agama yang berbeda terdapat 20 (dua puluh KK).

Menariknya pendapat di atas adalah karena di Kel. Kalipancur, penduduknya mayoritas Islam dengan berpegang pada mazhab Syafi'i. hal ini menunjukkan adanya langkah berani dari keluarga untuk membagi warisan. Padahal mayoritas ulama melarang pembagian waris beda agama. Dari sini muncul masalah, faktor-faktor apa yang melatar belakangi adanya pembagian waris dalam keluarga beda agama.

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm.36

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 36



Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih judul ini dengan tema: *Pembagian Waris pada Keluarga Beda Agama di kel. Kalipancur kec. Ngaliyan semarang*

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.<sup>11</sup> Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena keluarga beda agama?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembagian waris pada keluarga beda agama di kel. Kalipancur kec. Ngaliyan Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena keluarga beda agama
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pembagian waris pada keluarga beda agama di kel. Kalipancur kec. Ngaliyan Semarang

## **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan hasil penelitian di perpustakaan, ternyata baru hanya ada satu skripsi yang temannya hampir sama dengan penelitian sekarang, skripsi yang dimaksud yaitu berjudul: *Analisis Pendapat Nurcholis Majid tentang*

---

<sup>11</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

*Hukum Waris Mewarisi Antara Muslim dan Non Muslim*, disusun oleh A'isyatul Khalimah. Pada intinya skripsi ini mengungkapkan bahwa menurut Nurcholish Madjid, dkk bahwa dibolehkan waris mewarisi antara orang beda agama. Menurutnya, nash yang digunakan para ulama fiqih merupakan nash yang tidak menunjuk langsung pada pengharaman waris beda agama, melainkan hadis yang bersifat umum. Karenanya, ayat tersebut tidak bisa secara serta-merta bisa dijadikan landasan untuk melarang waris beda agama. Dalam banyak ayat, Tuhan justru mengakomodasi agama-agama langit (Kristen, Yahudi dan Shabi'ah) dan mereka yang beramal shaleh. Mereka pun akan mendapatkan surga di hari kiamat nanti.

Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitabnya yang berjudul: *Fiqh Lima Mazhab*. Dalam buku ini dipaparkan, para ulama mazhab sepakat bahwa, ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu: perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan. Mengenai perbedaan Agama, para ulama mazhab sepakat bahwa, non-Muslim tidak bisa mewarisi Muslim, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang Muslim bisa mewarisi non-Muslim? Imamiyah berpendapat: seorang muslim bisa mewarisi non muslim. Sedangkan mazhab empat mengatakan: tidak boleh.<sup>12</sup>

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Menurutnya Kompilasi Hukum Islam Indonesia tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya

---

<sup>12</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera Basritama, tth, hlm. 541-542

pewaris (ps. 171 huruf c). Untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam, pasal 172 menyatakan:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.<sup>13</sup>

Sedangkan *identitas* pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf b, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (ps. 171). Yang dimaksud berbeda agama di sini adalah antara orang Islam dan non-Islam. Perbedaan agama yang bukan Islam misalnya antara orang Kristen dan Budha tidak termasuk dalam pengertian ini.<sup>14</sup>

Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*. Dalam kitab ini dijelaskan: telah ada kesepakatan pendapat kaum muslim bahwa orang kafir itu tidak mewaris orang muslim, berdasarkan firman Allah surat an-Nisa ayat 141. Fuqaha berpendapat tentang mewarisnya orang muslim terhadap orang kafir dan orang murtad. Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabiin serta fuqaha Amshar berpendapat bahwa orang muslim tidak mewaris orang kafir karena adanya hadis sahih.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm. 125

<sup>14</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 404-405

<sup>15</sup>Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiil, 1409H/1989M, hlm. 413-417

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. penyusun kitab ini menyatakan: seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim; karena hadits yang diriwayatkan oleh empat orang ahli hadits, dari Usamah bin Zaid.<sup>16</sup>

Muslich Maruzi, dalam *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Ia mengetengahkan bahwa dasar hukum kelainan Agama sebagai *mani'ul irsi* ialah hadis Rasul yang berbunyi: Artinya: orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan Orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang muslim. Juga ketika Abu Tholib meninggal dunia, harta warisannya oleh Nabi Muhammad hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir yakni Uqail dan Tholib. Sedangkan Ali dan Ja'far yang telah muslim tidak diberi bagian. Dari hadis tersebut Jumhur Ulama sepakat bahwa antara orang muslim dan kafir tidak boleh saling mewarisi.<sup>17</sup>

*Mengkritisi Debat Fiqh Lintas Agama*, hasil karya Hartono Ahmad Jaiz, menampilkan transkrip secara utuh perdebatan mengenai buku *Fiqh Lintas Agama* kumpulan tulisan sembilan orang (Nurcholish Madjid, dkk cs.) dengan terbitnya buku kumpulan pendapat nyeleneh itu maka MMI (Majlis Mujahidin Indonesia) menantang pihak Paramadina wakil khusus tokoh utamanya Nurcholish Madjid, dkk untuk berdebat. Tantangan berdebat itupun dilayani Paramadina, maka diselenggarakanlah debat antara Paramadina dengan MMI di UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah di Ciputat Jakarta, Kamis 15 Januari 2004.

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 14, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 261

<sup>17</sup> Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981, hlm. 15-

Dari beberapa karya ilmiah di atas tampaklah bahwa belum ada yang membahas pembagian pada keluarga beda agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Semarang. Dengan demikian tidak ada upaya pengulangan dan penjiplakan

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini bermaksud menggambarkan, memaparkan keadaan obyek penelitian, yaitu menggambarkan tentang pembagian waris pada keluarga beda agama di kel. Kalipancur kec. Ngaliyan Semarang.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan teori berdasarkan data dan pengembangan pemahaman dari hasil penelitian. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisa, dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 15., Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Yogyakarta, 2001, hlm. 3. M. Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 89.

## **2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a Penentuan Sumber Data**

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Sumber data diperoleh dari data lapangan (*field research*).

Data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan 20 (dua puluh) keluarga beda agama dan tokoh masyarakat yang melakukan pembagian waris antara anggota keluarga tersebut di Kel. Kalipancur, kec. Ngaliyan Semarang

### **b Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, dilakukan secara bebas dan terarah serta mendalam, dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara ini dilakukan secara tidak terstruktur.

## **3. Analisa Data**

Metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan pembagian waris pada keluarga beda agama di kel. Kalipancur kec. Ngaliyan Semarang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang hak waris yang meliputi pengertian hukum waris, dasar hukumnya, syarat dan rukun waris, faktor penghalang waris mewarisi, pendapat ulama tentang hak waris keluarga beda agama.

Bab ketiga berisi gambaran umum keluarga beda agama terhadap hak waris keluarga di Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang yang meliputi: gambaran demografis Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang, Gambaran Umum Kehidupan Sosial Masyarakat Kel. Kalipancur, pembagian Warisan Keluarga Beda Agama di Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang, kerangka pembagian harta warisan

Bab keempat berisi hak waris keluarga beda agama di Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang yang meliputi: Analisis pembagian warisan pada keluarga beda agama di Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan di Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang, Analisis kerangka pikir pembagian harta warisan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HAK WARIS KELUARGA**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris**

Berbicara hukum waris, bahwa kata hukum dalam pengertian umum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.<sup>1</sup> Sedangkan hukum Islam oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh Ismail Muhammad Syah dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup>

Kata Hukum kewarisan dalam *Kompilasi Hukum Islam* (INPRES Nomor 1 tahun 1991) Pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>3</sup>

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum "

---

<sup>1</sup>E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966, hlm. 13.

<sup>2</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm. 19

<sup>3</sup>Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm. 125

waris" sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.<sup>4</sup> Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum "warisan"<sup>5</sup> Hazairin, mempergunakan istilah hukum "kewarisan"<sup>6</sup> dan Soepomo mengemukakan istilah "hukum waris".<sup>7</sup>

Menurut Soepomo bahwa "hukum waris" itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya<sup>8</sup>

Dengan istilah "hukum waris" di atas, terkandung suatu pengertian yang mencakup "kaidah-kaidah" dan azas-azas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia". Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum waris menurut "Kamus Umum Bahasa Indonesia", yaitu:

1. Waris :

Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.

2. Warisan:

---

<sup>4</sup>Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Bandar Maju, 1995, hlm. 14

<sup>5</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve, 's Granvenhage, hlm. 8

<sup>6</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an*. Jakarta, Tintamas, t.th, hlm 1.

<sup>7</sup>Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 1966, hlm. 72.

<sup>8</sup>*Ibid*

Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.

3. Pewaris :

Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat

4. Ahli waris:

Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

5. Mewarisi:

Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya<sup>9</sup>

6. Proses Pewarisan :

Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu :

- 1) Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
- 2) berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal<sup>10</sup>

Berkaitan dengan peristilahan tersebut di atas selanjutnya Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi"<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982, hlm. 1148.

<sup>10</sup>Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni, 1980, hlm. 23.

<sup>11</sup>*Ibid*, halaman 21

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan penegasan pengertian hukum waris yang dirumuskan dalam suatu batasan (definisi) sekedar untuk dipakai pegangan dalam paparan selanjutnya, antara lain sebagai berikut: Wirjono Prodjodikoro mengemukakan :

"Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup".<sup>12</sup>

Soepomo dalam bukunya "*Bab-bab tentang Hukum Adat*" mengemukakan sebagai berikut:

"Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>13</sup>

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan:

"Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".<sup>14</sup>

Seperti halnya Wirjono Prodjodikoro yang mempergunakan istilah "hukum warisan", maka dalam rumusan di atas R. Santoso Pudjosubroto yang mempergunakan istilah " hukum warisan " untuk pengertian " hukum waris ". Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila

---

<sup>12</sup>Wirjono Prodjodikoro, *op. cit*, hlm. 8

<sup>13</sup>Soepomo, *op. cit*, hlm. 72 – 73.

<sup>14</sup>R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964, hlm. 8.

ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang di tinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu ; kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.

B. Ter Haar Bzn dalam bukunya "*Azas-asas dan Susunan Hukum Adat*" terjemahan K. NG. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut: "Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi".<sup>15</sup>

A. Pitlo dalam bukunya "*Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*" memberikan batasan Hukum waris sebagai berikut:

"Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga"

16

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa "hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang

---

<sup>15</sup>Ter Haar Bzn, *Beginselen en Stelsel van Het Adat Recht*, Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, "Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat", Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, hlm. 197.

<sup>16</sup>A.Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1979, hlm. 1.

mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya".

Ahli fiqh telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya: ilmu Mawaris atau *ilmu Faraid*. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan *Faaridi, Fardii, Faraaidli, Firridl*.<sup>17</sup>

Tentang kata *faraid*, Syekh Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibary mengatakan:

جمع فريضة والفرض لغة التقدير وشرعا هنا نصيب مقدر للوارث<sup>18</sup>

Artinya: Kata faraid bentuk jama dari faridah artinya yang difardukan. Fardu menurut arti bahasa adalah kepastian; sedangkan menurut syara dalam hubungannya di sini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.

Para fuqaha menta'rifkan ilmu ini dengan:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

Artinya: Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.<sup>19</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal,

---

<sup>17</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 6

<sup>18</sup>Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyun*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera , tth, hlm. 95

<sup>19</sup>*Ibid*

baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.<sup>20</sup> Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>21</sup>

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.

Adapun dalam konteksnya dengan dasar hukum dari hukum waris, bahwa bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qat'i al-wurud*, juga *qat'i al-dalalah*, meskipun pada dataran *tanfiz* (aplikasi), sering ketentuan baku al-Qur'an tentang bagian-bagian warisan, mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya kasus *radd* dan *'aul*, dan sebagainya.

Menurut al-Syatibi yang dikutip Ahmad Rofiq, bahwa terhadap ketentuan al-Qur'an yang kandungannya ibadah atau bukan ibadah mahdah yang telah dirinci dalam al-Qur'an, seperti hukum kewarisan, perlu diterima secara *ta'abbudy* atau diterima secara *taken for granted*. Karena itu

---

<sup>20</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004 hlm. 132

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 6.

realisasinya, apa yang ditegaskan al-Qur'an diterima dengan senang hati, sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah.<sup>22</sup>

Selain al-Quran, hukum kewarisan juga didasarkan kepada Sunnah Rasulullah SAW., pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang *mukhtalaf fihi*.

### 1. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Quran cukup banyak yang menunjuk tentang hukum kewarisan. Di bawah ini akan dikutip pokok-pokoknya saja.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلَأُمُّهُ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمُّهُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika

---

<sup>22</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 374-376 dan 379



orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah dibayar utangnya. (Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. al-Nisa', 4:11).<sup>23</sup>

Tentang *asbab al-nuzul* surat al-Nisa ayat 11, dalam *Tafsir Jalalain* dijelaskan antara lain: bahwa diketengahkan oleh imam yang berenam dari Jabir bin Abdillah, katanya: Nabi saw., bersama Abu Bakar menjenguk saya di perkampungan Bani Salamah dengan berjalan kaki. Didapatinya saya dalam keadaan tidak sadar lalu dimintanya air kemudian berwudu dan setelah itu dipercikannya air kepada saya hingga saya siuman, lalu tanya saya: "Apa yang seharusnya saya perbuat menurut anda tentang harta saya? Maka turunlah ayat: *"Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"*.<sup>24</sup>

Selain ayat al-Qur'an di atas, dapat pula dijumpai dalam QS.al-Anfal: 8: 72; al-Ahzab: 33: 4, 5, 6, 40; dan al-Nisa: 4: 7, dan 33.

## 2. Al-Sunnah

Imam al-Bukhari menghimpun hadis tentang hukum kewarisan tidak kurang dari 46 hadis.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986, hlm. 116.

<sup>24</sup>Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dar al-Fikr, t.th. hlm. 397.

<sup>25</sup>Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 8, Mjdl. 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M, hlm. 2-13.'

Imam Muslim menyebut hadis-hadis kewarisan kurang lebih 20 hadis.<sup>26</sup> Di antaranya:

- a. Hadis riwayat Muttafaq 'alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
الْحَقُّوَالْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) <sup>27</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thaus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya). (HR. Bukhari dan Muslim).

- b. Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam (Muttafaq 'alaih).'
- c. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad Ibn Abi Waqas,

جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوُدَّاعِ مِنْ وَجَعٍ  
اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ بَلَغْتُ مِنْ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ  
وَلَا تَرْتَنِي إِلَّا ابْنَةُ أَفَّا تَصَدَّقُ بِثَلَاثِي مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ فَالْشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

<sup>26</sup>Muslim, *Sahih Muslim* juz 2, Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th., hm. 2-5.

<sup>27</sup>Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 189.

قال لا فقلت فالثلث والثلاث كثير اوكبير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير

من ان تذرهم عالة يتكففون الناس (متفق عليه)<sup>28</sup>

Artinya: Rasulullah SAW. datang menjengukku pada tahun haji wada' di waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah SAW. aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu? Aku ini orang berada, sementara tidak ada orang yang akan mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasiat)kan dua pertiga hartaku? "Jangan", jawab Rasulullah. Aku bertanya: "Separuh"? "Jangan" jawab Rasul. "Sepertiga"? tanya Sa'ad. Rasul menjawab: "Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak" (Muttafaq 'alaih).

- d. Hadis-hadis lain yang isinya menegaskan kembali tentang bagian-bagian warisan yang dinyatakan dalam al-Quran. Misalnya riwayat dari Huzail ibn Syurahbil mengatakan:

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل قال  
قضى النبي صلى الله عليه وسلم للأبنة النصف ولأبنة ابن السدس تكملة  
الثلاثين وما بقي فلأخت (رواه البخاري)<sup>29</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Adam dari Syu'bah dari Abu Qais dari Huzail bin Syurajil berkata: Nabi SAW. memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan (H.R. al-Bukhari).

<sup>28</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Tijariah Kubra, Mesir, tt.h, hlm. 110

<sup>29</sup>Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 4, Loc.,cit.

### 3. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Quran maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

### 4. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *radd* atau *'aul*, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama.

Yang perlu dikemukakan di sini adalah, bahwa meskipun hukum kewarisan, yang sering disebut dengan *fara'id* (ketentuan), adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang dikehendaki al-Qur'an. Yang jelas, penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku dalam al-Quran atau hadis tetap dipedomani untuk menentukan proporsional atau tidaknya penyelesaian pembagian warisan.

## B. Syarat dan Rukun Waris

Secara bahasa, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"<sup>30</sup> sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."<sup>31</sup>

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, *rukun*), jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, ialah: "sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri." Yang demikian itu terjadi, kata Al-Khudlari, karena hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.<sup>32</sup>

Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah "suatu unsur yang

---

<sup>30</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 1114.

<sup>32</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 95

merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu."<sup>33</sup> Definisi syarat adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada."<sup>34</sup> Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.<sup>35</sup>

Dalam hubungannya pembagian warisan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri.

Adapun syarat-syarat kewarisan sebagai berikut:

1. Matinya muwarrist (orang yang mewariskan).
2. Hidupnya waris (ahli waris) disaat kematian muwaris.
3. Tidak adanya penghalang – penghalang mewarisi.

Ad1. Matinya muwaris sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Kematian muwaris ada tiga macam :

1. Mati hakiki (sejati)
2. Mati hukmy (yuridis)

---

<sup>33</sup>Abdul Azis Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 1510

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 1691.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 1692.

### 3. Mati takdiri (menurut dugaan)

Mati hakiki adalah kematian (muwaris) atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang mafqud, yaitu yang hilang tanpa diketahui di mana berada dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Juga terhadap orang murtad yang menggabungkan diri dengan musuh, setelah tiga hari dia tidak bertobat, maka hakim boleh memutuskan bahwa dia telah meninggal dunia. Kematian tersebut berlaku sejak tanggal ketetapan hakim.

Mati takdiri adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

Ad2. Hidupnya waris disaat kematian waris.

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya terutama pada ahli waris yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya.

Orang yang mafqud tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim. Sedangkan dasar-dasar yang digunakan untuk ketetapan mati hidupnya mafqud, kami sajikan keterangan di dalam pasal khusus tentang orang yang mafqud.

Demikian juga tentang anak di dalam kandungan apakah ketika muwarisnya meninggal dunia sudah hidup di dalam kandungan muwaris atau belum, dalam hal ini akan diterangkan dalam pasal khusus tentang anak di dalam kandungan.

Ad3. Tidak adanya penghalang – penghalang muwaris.

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari mawani'ul irtsy yakni perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama.

Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:<sup>36</sup>

- a. *Al-Muwarris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya.<sup>37</sup> Syaratnya, al-muwarris benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmi) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan.<sup>38</sup>
  - Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
  - Mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya- upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim,

---

<sup>36</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, Jakarta: raja Grafindo Persada, 2002, hlm, 28-30

<sup>37</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 17

<sup>38</sup>Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 20-21



maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.

- Mati taqdiri, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.<sup>39</sup>

b. *Al-Waris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.<sup>40</sup> Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarriis*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-hami*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Masalah ini akan dibahas tersendiri dalam pembahasan tentang *al-haml*.

---

<sup>39</sup>Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 28

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, 257.

Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara al-muwarris dan al-waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi (mawdni' al-irs). Uraian tentang halangan saling mewarisi akan dibahas pada sub-C bab ini.

- c. *Al-Maurus* atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.<sup>41</sup>

### C. Faktor Penghalang Waris Mewarisi

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan mawaris' al-irs, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarris*. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu 1). Pembunuhan (*al-qatl*), 2). Berlainan agama (*ikhtilaf al-din*), 3). Perbudakan (*al-'abd*), dan yang tidak disepakati ulama adalah 4). Berlainan negara.

#### 1. Pembunuhan.

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap al-muwarris, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas (Jumhur) Ulama. Golongan Khawarij—yang memisahkan diri dari "Ali ibn Abi Thalib dan Mu'awiyah karena peristiwa arbitrase (tahkim) ketika pasukan Mu'awiyah hampir dikalahkan dengan mengangkat mushaf—menentang pendapat ini. Alasan mereka, ayat-ayat al-Qur'an tidak mengecualikan si pembunuh. Ayat-ayat

---

<sup>41</sup>Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin Pustaka Amani, 1981, hlm. 11-12

mawaris seperti dalam QS. al-Nisa' ayat 11- 12 hanya memberi petunjuk umum. Oleh karena itu petunjuk umum ayat-ayat tersebut harus diamalkan sebagaimana adanya.<sup>42</sup>

Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh untuk mewarisi harta peninggalan si mati adalah sabda Rasulullah SAW. di antaranya adalah:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَعَنْ  
عَمْرِو بْنِ ثَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)<sup>43</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Yahya dari Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dan dari Amru bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya ra., beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak ada sedikit pun harta warisan bagi pembunuh. (HR. an-Nasa'i),

Persoalannya adalah, mengingat banyak jenis dan macam pembunuhan, maka pembunuhan yang mana yang dapat menghalangi si pembunuh untuk mewarisi harta peninggalan korban. Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama mazhab Hanafiyah menjelaskan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a). Pembunuhan yang dapat diberlakukan qishas, yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, direncanakan dan menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, seperti pedang, golok,

---

<sup>42</sup>Muhammad 'Abd al-Rahim, *al-Muhadarat fi al-Miras al-Muqaran*, Kairo: tp, tth, hlm. 48.

<sup>43</sup>Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, hadis No. 1860 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

atau benda tajam lain, yang secara umum dan kasat mata diduga dapat digunakan untuk membunuh. Atau juga bisa menggunakan sejenis zat kimia yang menurut karakternya dapat menyebabkan seseorang meninggal ketika zat kimia tersebut masuk ke dalam tubuhnya.

- b). Pembunuhan yang hukumannya berupa kafarat, yaitu pembunuhan mirip sengaja (*syibh al-'amd*), seperti seseorang sengaja memukul atau menganiaya orang lain tanpa disertai niat dan bertujuan untuk membunuhnya. Akan tetapi tiba-tiba orang yang dipukul tersebut meninggal dunia. Maka pembunuhnya yang tidak sengaja bertujuan membunuh tersebut, dikenakan kafarat. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani, pembunuhan mirip sengaja dikategorikan sengaja, dengan menitikberatkan pada kematian korban. Jadi, bukan teknis dan cara memukul atau menganiaya yang dilihat. Pemahaman ini membawa implikasi terhadap jenis hukumannya, karena tidak lagi berupa kafarat tetapi sudah berubah menjadi qishas.
- c). Pembunuhan khilaf (*qatl al-khatha'*). Pembunuhan ini dapat dibedakan pada dua macam, pertama, khilaf maksud. Misalnya seseorang menembakkan peluru kepada sasaran yang dikira binatang dan mengenai sasaran, lalu meninggal. Ternyata yang terkena sasaran tersebut adalah manusia. Kedua, khilaf tindakan, seperti seseorang menebang pohon, tiba-tiba pohon yang roboh tersebut mengenai keluarganya yang melihat dari bawah hingga tewas. Abd al-Qadir Audah dalam buku *al-Tasyri'al-Jina'i al-Islamy* memberi contoh,

seseorang melepaskan tembakan pada suatu sasaran dengan maksud latihan, tetapi ternyata mengenai keluarganya. Kekeliruan ini terletak pada tindakannya yaitu tidak mengenai sasaran yang dimaksud dan justru mengenai sasaran lain yang berakibat keluarganya meninggal dunia.<sup>44</sup>

- d). Pembunuhan dianggap khilaf (*al-jar majra al-khatha*). Misalnya, seseorang membawa barang bawaan yang berat, tanpa disengaja bawaan tersebut jatuh dan menimpa saudaranya hingga tewas. Dalam hal ini si pembawa bawaan berat tersebut dikenai hukuman kafarat.

Lebih lanjut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembunuhan yang tidak menghalangi hak seseorang untuk mewarisi pewarisnya, ada empat yaitu:

- 1) Pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*),
- 2) Pembunuhan karena hak, seperti algojo yang disertai tugas untuk membunuh si terhukum,
- 3) Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
- 4) Pembunuhan karena 'uzur, seperti pembelaan diri.<sup>45</sup>

Ulama mazhab Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a. Pembunuhan sengaja,
- b. Pembunuhan mirip sengaja,

---

<sup>44</sup>Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, juz 1, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth., hlm. 84.

<sup>45</sup>Fatchur Rahman, *ilmu waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981, hlm. 89.

c. Pembunuhan tidak langsung yang disengaja.

Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a). Pembunuhan karena khilaf,
- b). Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
- c). Pembunuhan yang dilakukan karena hak atau tugas, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman qishas, dan
- d). Pembunuhan karena, uzur untuk membela diri.

Ulama mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang mewarisi yang berlaku secara mutlak. Di sini mereka tidak membedakan jenis pembunuhan, apakah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, beralasan atau tidak beralasan. Jadi seorang algojo misalnya, yang melakukan tembakan terhadap terdakwa yang masih ada hubungan keluarga, menyebabkannya tidak berhak mewarisi harta peninggalan si terpidana, kendatipun tidak ada ahli waris lainnya.

Dasar hukum yang digunakan adalah petunjuk umum sabda Rasulullah SAW. riwayat al-Nasa'i seperti dikutip terdahulu. Selain itu; diperkuat lagi bahwa tindakan pembunuhan dengan segala macam tipenya itu memutuskan tali perwalian, yang mana perwalian itu sendiri menjadi dasar untuk saling mewarisi. Dengan demikian,

tindakan pembunuhan itulah yang mewujudkan adanya penghalang untuk dapat mewarisi.<sup>46</sup>

Ulama Hanabilah mengemukakan pendapat yang lebih realistis, yaitu bahwa pembunuhan yang diancam dengan hukuman qishas, kafarat dan diyatlah yang dapat menjadi penghalang mewarisi bagi ahli waris, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja,
- b. Pembunuhan mirip sengaja,
- c. Pembunuhan yang dianggap khilaf,
- d. Pembunuhan khilaf,
- e. Pembunuhan tidak langsung, dan
- f. Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas (Jumhur) Ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang mewarisi, kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syari'at Islam, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman *qishas* atau hukuman bunuh lainnya.

Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan masalah ini yang perlu dipertimbangkan adalah banyaknya cara yang ditempuh si pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain, atau

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 91

menggunakan racun misalnya. Dalam kasus seperti ini, tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan kebenaran materiil menjadi tumpuan terakhir untuk dapat menentukan jenis dan katagori pembunuhan, apakah berakibat men)')adi penghalang mewarisi atau tidak.

## 2. Berlainan Agama

Mengenai perbedaan agama, akan peneliti jelaskan dalam sub D

## 3. Perbudakan (*al-'abd*).

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Firman Allah SWT menunjukkan:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun... (QS. al-Nahl: 75).<sup>47</sup>

Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekakan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan (*humanism*) dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam. Ini ditunjukkan

---

<sup>47</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986, hlm. 413.



melalui adanya sanksi-sanksi hukum, bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan, memerdekakan budak merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh. Ini dimaksudkan agar secepatnya perbudakan dihapuskan dan muka bumi.

Seorang hamba sahaya secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Karena hak-hak kebendaannya berada pada tuannya. Oleh karena itu ia tidak bisa menerima bagian warisan dari tuannya. Lebih dari itu, hubungan kekerabatan budak dengan saudara atau keluarganya sendiri terputus. Ahmad Muhammad al-Jurjawy mengemukakan bahwa budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya apabila tuannya meninggal dunia. Karena budak itu sendiri statusnya sebagai "harta" milik tuannya. Sebagai "harta" tentu tidak bisa memiliki, tetapi dimiliki, dan yang memiliki hanyalah yang berstatus merdeka, yaitu tuannya.

Demikian pula apabila ia sebagai muwarris, ia tidak bisa mewariskan hartanya sebelum ia merdeka. Misalnya ada seorang budak mukatab, yaitu budak yang berusaha memerdekakan dirinya sendiri dengan menyatakan kesanggupan untuk membayar angsuran sejumlah uang, atau melalui melakukan suatu pekerjaan, menurut perjanjian yang telah disepakati antara dirinya dengan tuannya, meskipun statusnya sebagai budak tidak penuh, ia tidak bisa mewarisi maupun mewariskan kekayaan yang ditinggalkannya.

#### **4. Berlainan Negara.**

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan negara

asing. Maka dalam konteks ini, negara bagian tidak dapat dikatakan sebagai negara yang berdiri sendiri, karena kekuasaan penuh berada di negara federal.

Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muwarrisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti tersebut di atas. Apabila dua negara sama-sama sebagai negara muslim, menurut para Ulama, tidak menjadi penghalang saling mewarisi antara warga negaranya. Malahan Mayoritas Ulama mengatakan, bahwa meskipun negaranya berbeda, apabila antara ahli waris dan muwarrisnya non-Muslim, tidak berhalangan bagi mereka untuk saling mewarisi. Demikian juga jika antara dua warga negara sama-sama Muslim.

Imam Abu Hanifah dan sebagian mazhab Hanabilah menyatakan bahwa antara mereka yang berlainan negara dan sama-sama non-muslim terhalang untuk saling mewarisi.<sup>48</sup>

Antara negara yang sama-sama muslim pada hakikatnya adalah satu, meskipun kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepala negaranya sendiri-sendiri. Negara hanyalah semata-mata sebagai wadah perjuangan, yang masing-masing di antara mereka terikat oleh satu tali persaudaraan, yaitu persaudaraan sesama muslim (*ukhuwah Islamiyah*).

Jadi, dari ilustrasi di atas, yang lebih prinsip untuk diperhatikan, tampaknya adalah soal adanya perbedaan agama antara ahli waris dan muwarrisnya yang berada di dua negara yang berbeda. Meskipun berbeda

---

<sup>48</sup>Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 40-41

negara, jika tidak ada perbedaan agama, maka tidak ada halangan untuk dapat saling mewarisi.

#### **D. Pendapat Ulama tentang Hak Waris Keluarga Beda Agama**

Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu juga sebaliknya.<sup>49</sup> Hukum ini disepakati para imam yang empat. Dihikayatkan oleh Said ibn Musaiyab dan an-Nakha'i bahwa muslim mengambil pusaka dari orang kafir, tidak sebaliknya, sebagaimana orang Islam boleh mengawini wanita kafir, wanita Islam tidak boleh dikawini lelaki kafir.<sup>50</sup>

Menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh orang, salah satu di antaranya adalah ahli dua agama (berlainan agama). Maka seorang Islam tidak dapat mewaris orang kafir, dan sebaliknya.<sup>51</sup>

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan al-muwarris, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarissnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan yang lain Syi'ah.

---

<sup>49</sup>Syekh Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm.293

<sup>50</sup>TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan antar Mazhab*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 310.

<sup>51</sup>Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, hlm. 6.

Dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

وعن اسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (متفق عليه)<sup>52</sup>

Artinya: Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (Muttafaq 'alaih).

Hadits riwayat Turmuzi sebagai berikut:

وعن عبد الله بن عمر رض الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين رواه احمد والاربعة والترمذى وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ<sup>53</sup>

Artinya: "dan dari Abdullah bin Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama (HR.Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nasa'i juga meriwayatkan dari Usamah bin Zaid).

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum ayat 141 surat al-Nisa' sebagai berikut:

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

<sup>52</sup>Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 98

<sup>53</sup>Al- Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as-Salmi at-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931, 137. Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiah tth, hlm. 196.

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin) (QS. al-Nisa: 141).<sup>54</sup>

Nabi SAW. sendiri mempraktikkan pembagian warisan, di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW. meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi SAW. harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu 'Ali dan Ja'far, oleh beliau tidak diberi bagian.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat muwarris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mati. Dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama.

Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya, karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi.

---

<sup>54</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986, hlm. 103

Pendapat Imam Ahmad di atas sejalan dengan pendapat golongan mazhab Syi'ah Imamiyah. Alasan yang dikemukakannya adalah, sebelum harta dibagi, harta-harta tersebut belum menjadi hak ahli waris yang pada saat kematian muwarris telah memeluk Islam. Namun pendapat terakhir ini, agaknya sulit diikuti, karena besar kemungkinan, kecenderungan seseorang untuk menguasai harta warisan akan dengan mudah mengalahkan agama yang dipeluknya, dan menyalahgunakan agama Islam sebagai upaya memperoleh harta warisan. Walaupun pada saat kematian muwarris, ia masih berstatus sebagai kafir, sebelum harta dibagi ia dapat menyatakan diri memeluk Islam untuk tujuan mendapatkan warisan.

Mayoritas Ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.<sup>55</sup>

Pemahaman yang dapat diambil dari praktik pembagian warisan Abu Thalib, adalah bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tidak menjadi penghalang saling mewarisi. Hakikatnya, antara agama-agama selain Islam adalah satu, yaitu agama yang sesat. Demikian pendapat Ulama-ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Abu Dawud al-Zahiry. Dasar hukumnya adalah Firman Allah SWT:

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

Artinya: ...maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan... (QS.Yunus-.32).

---

<sup>55</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, hlm. 12

Imam Malik dan Ahmad mengemukakan pendapat bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tetap menjadi penghalang mewarisi. Dasarnya adalah, bahwa masing-masing agama mereka mempunyai syari'at sendiri-sendiri, seperti diisyaratkan Firman Allah SWT:

لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ  
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Bagi setiap umat di antara kamu, Kami jadikan suatu peraturan dan tata cam (sendiri-sendiri)... (QS. al-Maidah: 48).

Mengenai orang murtad orang yang keluar dari agama Islam, para Ulama memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali (*shilah*) syari'ah dan melakukan kejahatan agama.<sup>56</sup> Karena itu, meskipun dalam isyarat al-Qur'an bahwa mereka dikategorikan sebagai orang kafir, para Ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapa pun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke baitul-mal sebagai harta *fai'* atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum.

Imam Hanafi memberi ketentuan, apabila orang yang murtad memiliki harta yang diperoleh ketika dia masih memeluk Islam, dapat diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim. Selebihnya, dimasukkan ke baitul-mal. Sudah barang tentu hal ini dapat dilakukan jika dapat dipisah-pisahkan harta mana yang diperoleh ketika masih Muslim dan mana yang diperolehnya setelah murtad.

---

<sup>56</sup> Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981, hlm.

Apabila tidak bisa dipisah-pisahkan, maka sebaiknya semua kekayaannya dimasukkan ke baitul-mal.

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* menerangkan tentang waris beda agama secara rinci yang uraiannya dapat diikuti di bawah ini.<sup>57</sup> Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabiin serta fuqaha Amshar berpendapat bahwa orang muslim tidak mewaris orang kafir karena adanya hadis sahih tersebut.

Dalam pada itu, Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiyah dari kalangan sahabat, serta Sa'id bin al-Musayyab dan Masruq dari kalangan tabiin, dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa orang muslim itu mewaris orang kafir. Dalam kaitan ini mereka menyamakan hal itu dengan wanita-wanita orang kafir yang boleh dikawini. Mereka berkata, "Kami boleh mengawini wanita mereka, tetapi kami tidak diperbolehkan mengawinkan mereka dengan wanita kami, maka begitu halnya dengan hal warisan." Dan dalam hal ini mereka meriwayatkan hadis yang musnad. Abu Umar berkata, "Pendapat tersebut tidak kuat bagi jumhur fuqaha." Mereka juga menyamakan kepewarisan dari orang kafir tersebut dengan qishash darah yang tidak seimbang.

Adapun mengenai harta orang murtad, jumhur fuqaha Hijaz berpendapat bahwa harta orang murtad jika ia terbunuh atau mati secara wajar untuk kaum muslim, sedang keluarganya tidak mewarisinya. Pendapat ini

---

<sup>57</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 413 – 417.



dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i serta dipegangi oleh Zaid r.a. dari kalangan sahabat.<sup>58</sup>

Dalam pada itu, Abu Hanifah, ats-Tsauri, jumhur fuqaha Kufah, dan kebanyakan fuqaha Basrah berpendapat bahwa orang murtad itu diwarisi oleh para pewarisnya yang memeluk agama Islam. Ini adalah pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud r.a. dari kalangan sahabat.

Fuqaha golongan pertama berpegangan pada keumuman hadis. Sedang fuqaha golongan kedua berpegangan dengan mentakhsiskan keumuman hadis dengan qiyas. Qiyas mereka dalam hal ini ialah hubungan kekerabatan para pewaris muslim itu lebih utama dibanding kaum muslim, karena pewaris tersebut mengumpulkan dua sebab, yakni Islam dan kekerabatan, sementara kaum muslim hanya mempunyai satu sebab saja, yaitu Islam.<sup>59</sup>

Nampaknya golongan kedua ini menguatkan pendapat bahwa hukum Islam masih diberlakukan terhadap harta orang murtad, dengan bukti hartanya tidak diambil seketika, tetapi ditunggu sampai ia mati. Karena itu, hidupnya masih dianggap dalam rangka memelihara hartanya tetap berada dalam hak miliknya. Itu berarti hartanya harus dihormati sesuai ketentuan hukum Islam. Karena itu, hartanya tidak boleh ditetapkan atas dasar kemurtadan, berbeda dengan harta orang kafir.

Menurut Syafi'i dan yang lain, qadla' salat yang ditinggalkan selama murtad dapat diterima, jika ia bertobat dari murtadnya. Golongan lain mengatakan, hartanya itu ditangguhkan dulu, karena masih kehormatan Islam.

---

<sup>58</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm.86

<sup>59</sup>*Ibid*

Dengan penangguhan itu diharapkan ia mau kembali kepada Islam dan penguasaan kaum muslim terhadap hartanya itu, tidak melalui jalan warisan. Sementara itu, ada segolongan fuqaha yang nyleneh pendapatnya, dengan mengatakan, begitu terjadi kemurtadan, hartanya itu untuk kaum muslim. Menurut dugaan saya, Asyhab adalah salah seorang yang berpendapat demikian.

Adapun tentang warisan antar agama, bahwa fuqaha sependapat untuk memberikan warisan kepada pemeluk agama yang satu, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pewarisan antar agama yang berbeda-beda.<sup>60</sup>

Malik dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa pemeluk agama yang berbeda-beda tidak saling mewaris, seperti orang Yahudi dan Nasrani. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan segolongan fuqaha.

Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, ats-Tsauri, Dawud dan yang lain-lain berpendapat, bahwa semua orang kafir saling mewaris.

Sementara itu, Syuraih, Ibnu Abi Laila, dan segolongan fuqaha membagi agama-agama yang tidak saling mewaris menjadi tiga golongan. Orang-orang Nasrani, Yahudi, dan Sabi'in adalah satu agama; orang-orang Majusi dan mereka yang tidak mempunyai kitab suci adalah satu agama; dan orang-orang Islam adalah satu agama pula. Dari Ibnu Abi Laila diriwayatkan bahwa ia berpendapat, seperti pendapat Malik.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 87

<sup>61</sup> Ibnu Rusyd, *op. cit*, hlm. 414

Malik dan fuqaha yang sependapat dengannya berpegangan pada hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Sedang ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpegangan pada sabda Nabi Saw:

وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (متفق عليه)<sup>62</sup>

Artinya: Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (Muttafaq 'alaih).

Berdasarkan dalil *khithab mafhum* hadis tersebut adalah orang muslim itu dapat mewaris sesama orang muslim, dan orang kafir dapat mewaris sesama orang kafir. Pendapat yang menggunakan dalil khithab mengandung kelemahan, seperti nampak dalam kasus waris ini.

---

<sup>62</sup>Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 98

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM KELUARGA BEDA AGAMA ERHADAP HAK WARIS KELUARGA DI KEL. KALIPANCUR KEC. NGALIYAN SEMARANG**

### **A. Gambaran Demografis Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang**

Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, terletak di sebelah barat Kota Semarang yang berjarak 12,5 Km dari ibukota Propinsi. Kelurahan Kalipancur merupakan daerah dataran tinggi yang mempunyai ketinggian 57 M dari permukaan laut dengan curah hujan 35 mm/tahun, suhu udara rata-rata 31 °C dan luas wilayah 125,370 Ha dengan batas wilayah:

Sebelah Utara : Kelurahan Kembangarum

Sebelah Selatan : Kelurahan Sukorejo

Sebelah Barat : Kelurahan Bambankerep

Sebelah Timur : Kelurahan Manyaran

Yang terbagi dalam 11 RW dan 95 RT dengan jumlah penduduk laki-laki 7.114 orang, perempuan 7.231 orang., terhimpun dalam penduduk usia produktif adalah 13.793 orang.<sup>1</sup>

### **DATA TEMPAT IBADAH KELURAHAN KALIPANCUR**

1. Masjid Baitul Mustakim : Ringintelu RT 02/RW01

2. Masjid at Taqwa : Jl. Mayangsari RT 01/RW02

---

<sup>1</sup>Monografi Kelurahan Kalipancur

3. Masjid al Hidayah : Jl. Kembangarurn RT 01/RW03
4. Masjid al Ikhlas : Jl. Kalipancur RT 01/RW 04
5. Masjid al Sidiq : Jl. Tembaga Selatan RT08/RW05
6. Masjid. Al Muhajirin : Jl. C.Mutiara Sit. RW06
7. Masjid al Falah : Jl. C.Mutiara Raya 04/RW07
8. Masjid al Ittihad : Jl. C.Kencana RT04/RW08
9. Masjid al Hikmah : Jl. C.Permata Raya RT03/RW09
10. Masjid an Nahl : Jl, C.PrambananRT01/RW 10
11. Masjid al Falah. : Jl, C.Mendut RT03/RW01
12. Mushola Nurrusalam : Jl. C.Pawon Sit, RT08/W01
13. Mushola Al Amin : Jl. Penataran RT 06/RW03
14. Mushola : Jl, C.Pawon Utara RT10/RW01
15. Gereja Kristen Jawa : Jl. C.Pawon Sit. RT09/RW 01
16. Gereja Kristen : Jl. C.Pawon Sit RT07/RW01
17. Gereja Isa Al Masih : Jl. Untung Suropati
18. Gereja Kristen : Jl. Mayangsari RT03/RW02.<sup>2</sup>

#### Data Wilayah Kelurahan Kalipancur

##### A. Luas dan batas wilayah kelurahan Kalipancur

- LuasWilayah :  $\pm 125.370$  Ha.

##### B. Batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kelurahan Kembang aruym, kecamatan Semarang  
Barat

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

- Sebelah Selatan : Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati
- Sebelah Barat : Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngalian
- Sebelah Timur : Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat

Data Kependudukan kelurahan Kalipancur :

- Jumlah K.K = 3.687
- Jumlah Penduduk = 15.333
- Jumlah R.W = 13
- Jumlah R.T = 95.<sup>3</sup>

Jumlah Penduduk menurut Wilayah RW :

No	R.W.	JUMLAH JIWA	JUMLAH K.K	KET
1.	I.	1693	378	
2.	II	1482	344	
3.	III	1416	326	
4.	IV	908	182	
5.	V	1904	366	
6.	VI	1962	360	
7.	VII	1305	242	
8.	VIII	680	136	
9.	IX	1363	285	
10.	X	548	171	
11.	XI	447	135	
12.	XII	1702	380	
13.	XIII	1709	382	

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

**LAPORAN MONOGRAFI KELURAHAN KALIPANCUR  
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG PROPINSI JAWA  
TENGAH  
KEADAAN BULAN : DESEMBER TAHUN : 2006**

Jumlah Kepala Keluarga: 3687 KK

Penduduk Desa/Kecamatan dalam Kelompok Umur & Kelamin

Kel. Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	624	526	1150
5 - 9	766	758	1524
10 - 14	755	714	1469
15 - 19	760	835	1595
20 - 24	757	788	1545
25 - 29	803	873	1676
30 - 34	814	868	1682
35 - 39	617	710	1327
40 - 44	545	461	1006
45 - 49	519	406	925
50 - 54	409	307	716
55 - 59	109	229	338
60 - 64	95	182	277
64 +	45	58	103
Jumlah	7618	7715	15333

**Mata Pencarian (Bagi umur 10 tahun ke atas)**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1	Petani sendiri	802
2	Buruh tani	726
3	Nelayan	-
4	Pengusaha	2595
5	Buruh industri	1840
6	Buruh bangunan	1561
7	Pedagang	829
8	Pengangkutan	1713
9	Pegawai Negeri (Sipil + ABRI)	598
10	Pensiunan	1995
11	Lain - lain	
	Jumlah	12659

**Penduduk Menurut Pendidikan (Dari Umur 5 Tahun ke atas)**

No	Jenis Pendidikan	Banyaknya orang
1	Perguruan Tinggi	2085
2	Tamat Akademi	2059
3	Tamat SLTA	3114



4	Tamat SLTP	2394
5	Tamat SD	1023
6	Tidak Tamat SD	2451
7	Belum Tamat SD	1057
8	Tidak Sekolah	-
	Jumlah	14183

### **MUTASI PENDUDUK**

No.	Mutasi	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	Pindah	2	5	7
2	Datang	13	20	33
3	Lahir	6	7	13
4	Mati	2	2	4
5	Mati - 5 Th	-	-	-
6	Mati + 5 Th		2	4

### **BANYAKNYA PEMELUK AGAMA**

No.	Golongan Agama	Banyaknya pemeluk agama
1	Islam	11539
2	Kristen Katolik	1725
3	Kristen Protestan	1611
4	Budha	258

5	Hindu	200
6	Lain - lain	
	Jumlah	15333

#### **BANYAKNYA KEJADIAN**

- a. Nikah : 6 Orang
- b. Talak/Cerai : - Orang
- c. Rujuk : - Orang

#### **Jumlah Akseptor KB**

- a. Pil : 351 Orang
- b. Kondom : 291 orang

### **B. Gambaran Umum Kehidupan Sosial Masyarakat Kel. Kalipancur**

Kelurahan Kalipancur termasuk kelurahan yang terletak di sebelah Barat Kota Semarang, dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah wiraswasta, memiliki jarak tempuh yang relatif dekat dari pusat pemerintahan. Kondisi kelurahan ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat perkotaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat variatif. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat kota dengan masyarakat desa pada umumnya.

Di Kelurahan Kalipancur, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya tidak meninggalkan warisan budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang

yang luhur. Di samping itu masih kuatnya *tepo selero* (tenggang rasa) dengan sesama manusia terlebih tetangga di sekitarnya serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat Jawa.

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perkumpulan secara arisan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat ditingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama.
- b. Perkumpulan Ibu-ibu PKK secara rutin, kelompok ibu-ibu yang terdiri dari arisan RT dan perkumpulan arisan dasawisma. Perkumpulan dan arisan ibu-ibu dilaksanakan ditingkat RT, memiliki fungsi dan manfaat seperti pada perkumpulan arisan bapak-bapak. Perkumpulan arisan dasawisma dan ibu-ibu PKK diadakan di tingkat RW. Perkumpulan PKK memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta yang positif bagi ibu-ibu dalam keluarga. Sedangkan arisan dasawisma merupakan arisan kelompok yang lebih cenderung berorientasi pada nilai

ekonomi, meskipun di dalamnya juga terdapat nilai-nilai sosial budaya juga.

c. Perkumpulan remaja yang ada disetiap RT/RW, dan kelurahan. Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain Karang Taruna merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja dengan tujuan antara lain :

- (1). Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja.
- (2). Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta terbiasa untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.
- (3). Sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja.
- (4). Sebagai sarana transformasi segala informasi dari pemerintah pusat yang perlu diketahui oleh para remaja di Kelurahan Kalipancur.
- (5). Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja yang nantinya akan bermanfaat bagi remaja pada usia selanjutnya sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Kalipancur.<sup>4</sup>

Sedangkan kegiatan-kegiatan ritual yang masih membudaya di tengah-tengah masyarakat adalah

- 1) Upacara perkawinan. Sebelum di adakan upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu diadakan upacara *peminangan* (tukar cincin menurut adat jawa), yang sebelumnya didahului dengan permintaan dari utusan

---

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Titik Suharni, S.H., selaku Sekertaris Lurah Kelurahan Kalipancur, wawancara dilakukan tgl. 21 Januari 2007 di Balai Desa Kelurahan Kalipancur.

calon mempelai laki-laki atau orang tuanya sendiri terhadap calon mempelai perempuan. Kemudian akan dilanjutkan ke jenjang peresmian perkawinan yang diisi dengan kegiatan yang Islami seperti *Tahlilan* dan *Yasinan* yang bertujuan untuk keselamatan kedua mempelai, dengan dihadiri oleh seluruh sanak keluarga, tetangga maupun para sesepuh setempat.

- 2) Upacara anak dalam kandungan. Dalam upacara ini meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah: acara Anak Dalam Kandungan a). *Ngepati*, yaitu suatu upacara yang diadakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 4 bulan, karena dalam masa 4 bulan ini, menurut kepercayaan umat Islam malaikat mulai meniupkan roh kepada sang janin. b) *Mitoni* atau *Tingkepan*, yaitu upacara yang diadakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan upacara ini dilaksanakan pada waktu malam hari, yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama guna membaca surat Taubat
- 3) Upacara Kelahiran Anak (*Babaran* atau *Brokohan*) Upacara ini dilaksanakan ketika sang anak berusia 7 hari dari hari kelahirannya, yaitu berupa selamat yang biasa disebut dengan istilah "*Brokohan*". Upacara ini diisi dengan pembacaan kitab *Al Barjanzi*. Kemudian jika anak itu laki-laki maka harus menyembelih dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing.

- 4) Upacara *Tudem*/anak mulai jalan. Selama anak mulai lahir dan belum bisa berjalan, setiap hari kelahirannya (*selapanan*, *tigalapan*, *limalapan*, *tujuhlapan* dan *sembilanlapan*) biasanya diadakan selamatan berupa nasi *gunugan* dan lauk-pauk sekedamya untuk dibagikan kepada tetangga terdekat. Sedangkan ketika sang anak berusia 7 bulan akan diadakan selamatan lebih besar lagi.
- 5) Upacara Khitanan/Tetakan. Upacara ini diadakan terutama bagi anak laki-laki. Upacara ini biasanya diadakan secara sederhana atau besar-besaran, tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Namun kalau hanya mempunyai anak tunggal/ontang-anting, kepercayaan dari orang Jawa adalah anak tersebut harus di "Ruwat" dengan menanggapi wayang kulit yang isi ceritanya menceritakan Batara Kala dengan memberi sesaji berupa tumpengan atau panggang daging agar tidak dimakan rembulan.
- 6) Selamatan menurut Penanggalan (Kalender Jawa). Di antara kalender-kalender umat Islam yang biasanya dilakukan selamatan antara lain: 1 Syura, 10 Syura untuk menghormati Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Maulud (Robi'ul Awal) untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanggal 27 Rajab untuk memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tanggal 29 Ruwah (dugderan), 17 Ramadhan (memperingati Nuzul Qur'an), 21, 23, 24, 27 dan 29 maleman, 1 Syawal (hari raya Idul Fitri), 7 Syawal (*katupatan*) biasanya diramaikan dengan membuat ketupat dan

digunakan untuk selamatan di mushala terdekat, dan dibulan Apit bagi masyarakat mengadakan upacara sedekah bumi, dan kepala desa menanggapi gong/wayang sebagai syarat untuk mengingatkan warga masyarakat desa untuk masak-masak. Setelah magrib menyiapkan sebagian untuk selamatan di mushala terdekat dan begitu juga dibulan 10 Besar (Hari Raya Idul Qurban), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berkorban .

- 7) Upacara Penguburan Jenazah. Salah satu dari upacara penguburan jenazah adalah upacara *brobosan*, upacara ini dilakukan oleh sanak saudara terdekat yang tujuannya untuk mengikhlaskan kematiannya. Adat kebiasaan di atas merupakan nilai -nilai yang berasal dari leluhur yang telah diimplementasikan dalam tata nilai dan laku perbuatan sekelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, nilai tradisi — tradisi yang berkembang di Kelurahan Kalipancur kadang-kadang diisi dengan kegiatan yang memiliki nilai-nilai keagamaan sehingga agak kesulitan untuk dibedakan antara nilai budaya dengan nilai keagamaan.

### **C. Pembagian Warisan Keluarga Beda Agama di Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang**

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, terletak di sebelah barat Kota Semarang yang berjarak 12,5 Km dari ibukota Propinsi. Kondisi ini telah membuka

peluang masuknya segala bentuk budaya serta memperluas pergaulan dan asimilasi serta akulturasi nilai-nilai budaya dari luar serta agama. Atas dasar itu ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena keluarga beda agama di antaranya:

1. Faktor pendidikan.

Di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan bahwa pendidikan yang ditempuh oleh anak, remaja dan pemuda sangat beragamam, namun pada umumnya mereka diberi kebebasan untuk memasuki sekolah-sekolah yang sesuai dengan minat anak. Pada umumnya mereka lebih banyak masuk sekolah-sekolah umum dengan pertimbangan bahwa lulusan dari sekolah umum lebih besar peluangnya untuk bisa diterima di perusahaan-perusahaan dibandingkan dengan sekolah-sekolah diniyah. Keadaan ini membuka peluang pada mereka untuk dengan mudah menyerap buku-buku bacaan orientalis yang terasa sangat mengedepankan rasio dan menumpulkan keimanan. Mereka tampaknya mudah menterap paham-paham yang mempersamakan substansi semua agama. Agama dalam pandangan mereka merupakan sekumpulan ajaran yang mempunyai nilai-nilai kebenaran dan ini melekat pada semua agama. Surga dan neraka bukan hanya diperuntukkan bagi umat Islam namun semua agama mempunyai peluang yang sama untuk masuk surga dan neraka. Yang penting amal perbuatan atau realisasi dari ajaran agama itulah yang bisa menuntun manusia untuk diterima di sisi Tuhan. Dalam pandangan



mereka bahwa semua agama sama, benar dan baik, sehingga manusia bebas dan boleh memilih agama apa saja yang disukai.<sup>5</sup>

## 2. Faktor budaya.

Masuknya budaya-budaya asing sangat mudah diapresiasi dan ternyata budaya asing lebih dominan menjadi pilihan mereka. Bagi mereka budaya asing lebih rasional dan lebih maju sehingga sesuai dengan dinamika zaman dan lebih menjawab kebutuhan zaman meskipun budaya asli pun tidak mereka tinggalkan tapi dalam cara berpikir mereka lebih menjadikan budaya asing sebagai tolok ukur untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dan berkembang.<sup>6</sup>

## 3. Faktor agama.

Sikap keberagaman mereka sangat terbuka dan membuang jauh-jauh sikap fanatisme beragama. Bagi mereka fanatisme beragama hanya menyesatkan dan sangat tidak menguntungkan. Adanya kebebasan memilih agama harus ditanamkan pada anak-anak agar tidak terjadi konflik keagamaan, yang penting nilai dari agama itu betul-betul diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup>

Berikut ini petikan wawancara dengan beberapa warga yang dalam kehidupan keluarganya terdapat perbedaan agama:

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Nurhadi selaku sesepuh warga Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, wawancara dilakukan tgl. 22 Januari 2007

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Sudirman selaku sesepuh warga Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, wawancara dilakukan tgl. 23 Januari 2007

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Sofi selaku sesepuh warga Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, wawancara dilakukan tgl. 23 Januari 2007

1. Keluarga Arifin

Menurut Arifin keluarga beda agama adalah hal yang biasa terjadi karena kita hidup berdampingan dengan agama lain. Untuk itu baginya perbedaan agama tidak menghilangkan hak waris bagi ahli waris yang beda agama

2. Keluarga Fajar

Menurut Fajar hal ini bisa terjadi karena ada ikatan yang sangat kuat antara dia dengan istrinya sehingga perbedaan agama bukan menjadikan halangan untuk berumah tangga, dan tidak ada kaitannya dengan soal hak waris, pokoknya setiap orang yang namanya keluarga sendiri ya mendapat warisan.

3. Keluarga Rohmat

Rohmat berpendapat keluarga beda agama sama saja dengan yang lain, hanya ketaatannya saja pada agama yang membedakannya. Urusan warisan tidak bisa dihubungkan dengan persoalan berlainan agama. Masalah agama ya nafsi-nafsilah

4. Keluarga Hidayat

Menurut Hidayat keluarga beda agama adalah bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan karena Pancasila saja tidak melarang. Begitu juga dengan warisan apa dasarnya menghapus hak waris hanya lantaran beda agama

5. Keluarga Rifan

Menurut Rifan, justru inilah penerapan demokrasi yang sebenarnya dalam kehidupan, termasuk demokrasi dalam membagi waris ya harus dibagi secara adil. Soal beda agama itu kan menyangkut keyakinan dan tidak bisa dipaksakan

6. Keluarga Hadi

Menurut Hadi, keluarga beda agama yang terjadi padanya adalah karena faktor pergaulan yang pernah dijalaninya. Pembagian waris siapa saja asal dalam lingkup masih keluarga dekat mengapa tidak dibagi, ah itu kasihan toh dengan nasibnya. Agama masalah akhirat waris toh masalah duniawi jadi harus dibedakan

7. Keluarga Rodja

Menurut Rodja ini adalah hasil kebebasan yang diberikan orang tua padanya, dan orang tua tidak pilih kasih dalam membagi harta hanya karena beda agama

8. Keluarga Nur Heti

Menurut keluarga Nur Heti, perbedaan agama bukan menjadi suatu penghalang bagi seseorang untuk melakukan pernikahan.

9. Keluarga Suradi

Menurut Suradi, hal terpenting dalam membina rumah tangga adalah rasa saling mengerti satu sama lain.

10. Keluarga Chaniago

Menurut Chaniago mengapa hal ini bisa terjadi karena dia dan istrinya terbiasa bergaul dengan pemeluk agama lain, sehingga rasa cinta akan datang dengan sendirinya.

#### 11. Keluarga Sudiro

Menurut Sudiro perbedaan bukanlah suatu masalah asal kita bisa menyikapinya dengan benar.

#### 12. Keluarga Sudibdjo

Menurut Sudibjo pendidikan adalah hal yang paling mendasar kenapa dia bisa menjalani keluarga beda agama.

#### 13. Keluarga Sobari

Menurut Sobari, keluarga beda agama adalah hal yang tidak perlu dipermasalahkan karena rumah tangga tidak harus terjadi antara satu agama saja.

#### 14. Keluarga Rohman

Menurut Rohman, mengapa hal bisa ini terjadi padanya adalah karena faktor keluarga, yang mana orang tuanya juga menjalankan hal yang demikian.

#### 15. Keluarga Tatang

Menurut Tatang keluarga beda agama yang dijalannya terjadi begitu saja tanpa ada permasalahan.

#### 16. Keluarga Hasan Kurnia

Menurut Hasan Kurnia, faktor utama dalam menjalani rumah tangga adalah rasa cinta yang besar yang bisa mengalahkan semua perbedaan.

#### 17. Keluarga Hidayat

Menurut Hidayat dan istrinya, perbedaan agama tidak menjadi hal yang bisa menghalangi seseorang untuk membentuk keluarga yang baik.

#### 18. Keluarga Samidjo

Menurut Samidjo, perbedaan agama yang terjadi antara dia dan istrinya adalah karena orang tua mereka tidak terlalu mempermasalahkan hal ini.

#### 19. Keluarga Hamim

Menurut Hamim, janganlah membesar-besarkan masalah perbedaan agama karena hal ini bisa menimbulkan permasalahan.

#### 20. Keluarga Mulyani

Menurut Mulyani, keluarga beda agama yang dijalannya dengan suaminya sekarang adalah masalah hak asasi.

### **D. Kerangka Pikir Pembagian Harta warisan**

Dalam penelitian di kelurahan Kalipancur, berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu yang berjumlah 20 keluarga, dijumpai adanya keluarga yang antara anak dengan orang tuanya berbeda agama, yang satu Islam dan lainnya beragama Kristen, juga ada Hindu dan Budha. Satu hal yang menarik dari kehidupan keluarga itu yaitu pada waktu orang tua dari keluarga itu meninggal dunia ternyata ada pembagian waris dan waris itu di

bagi-bagi tanpa membedakan agama.<sup>8</sup> Untuk lebih jelasnya hasil penelitian ini diterangkan sebagai berikut :

1. Pada saat pewaris misalnya orang tua dari keluarga itu meninggal dunia, maka setelah beberapa hari kemudian dari wafatnya orang tua itu ( pada umumnya 7 hari sesudah itu ) seluruh sanak keluarga dikumpulkan dan jika ada diantara anak yang berdomisili cukup jauh, musyawarah itu belum bisa dilangsungkan sebelum anggota keluarga hadir secara lengkap.<sup>9</sup>
2. Sesudah berkumpul anggota keluarga secara lengkap, kemudian dihadirkan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap tahu tentang hukum, kemudian diminta untuk mengarahkan pembagian waris.
3. Dalam pembagian waris, harta peninggalan dibagi-bagi secara sama rata tanpa membedakan jenis kelamin dan agama.<sup>10</sup>
4. Dalam pembagian itu apabila ada sanak keluarga yang mempersoalkan agama, maka itu bukan saja dianggap sebagai perkataan yang tercela tapi juga dia akan dituduh sebagai orang yang mempunyai sifat dan tabiat buruk. Jadi dalam keluarga yang berbeda agama itu pembagian waris sama sekali tidak ada hubungannya dengan soal agama dan dalam kenyataannya justru mereka lebih melihat kepada jasa – jasa yang pernah ditanamkan ahli waris kepada pewaris sewaktu masih hidup.<sup>11</sup> Jadi biasanya ahli waris yang paling banyak menanamkan jasa pada pewaris

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Arifin sebagai karyawan tanggal 20 januari 2007

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak fajar sebagai guru tanggal 21 januari 2007

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Rohman sebagai guru tanggal 22 januari 2007

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Tatang sebagai wiraswasta tanggal 23 januari 2007

(almarhum) diberi peluang untuk mengemukakan pendapat apakah setuju atau tidak.

5. Setelah pembagian waris dilaksanakan, masing – masing anggota keluarga disuruh menandatangani surat persetujuan bersama tentang pembagian waris dan ditanda tangani di atas kertas bermeterai atau segel. Jika dikemudian hari salah seorang keluarga tidak puas dengan hasil persetujuan tersebut sehingga berakibat berlanjutnya sengketa itu maka biasanya keluarga membentuk perdamaian dan untuk tercapainya perdamaian itu tokoh masyarakat yang sebelumnya pernah hadir dihadirkan kembali sebagai juru damai kalau upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang diharapkan maka penyelesaian sengketa akan dirembukkan di balai kelurahan.<sup>12</sup>
6. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh Lurah jika masih belum teratasi, penyelesaian sengketa dilimpahkan pada pihak kecamatan, di kantor kecamatan inilah merupakan penentuan apakah sengketa ini bisa berakhir dengan perdamaian ataukah berlanjut sampai ke pengadilan.<sup>13</sup>
7. Apabila sengketa sampai pada tingkat pengadilan maka biasanya keluarga akan sangat membenci pada pihak yang menggelar sengketa itu sampai di pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa meskipun perkara sudah sampai di tingkat pengadilan namun tidak menutup kemungkinan sengketa itu dihentikan dan berakhir dengan perdamaian.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan Kurnia sebagai pengusaha tanggal 24 januari 2007

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Hidayat sebagai PNS tanggal 23 januari 2007

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Samidjo sebagai wiraswasta tanggal 23 januari 2007

## **BAB IV**

### **HAK WARIS KELUARGA BEDA AGAMA DI KEL. KALIPANCUR KEC. NGALIYAN SEMARANG**

#### **A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Pada Keluarga Beda Agama di Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang**

Sebagaimana telah diutarakan dalam bab III, di Kelurahan Kalipancur warisan dapat dibagi meskipun antara anggota keluarga itu terdapat perbedaan agama. Menurut peneliti hal ini sangat bertentangan dengan pendapat para imam mazhab atau dengan kata lain bertentangan dengan hukum Islam. Untuk memperkuat alasan ini maka berikutnya peneliti mengetengahkan pendapat fuqaha sebagai berikut :

Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu juga sebaliknya.<sup>1</sup> Hukum ini disepakati para imam yang empat. Dihikayatkan oleh Said ibn Musaiyab dan an-Nakha'i bahwa muslim mengambil pusaka dari orang kafir, tidak sebaliknya, sebagaimana orang Islam boleh mengawini wanita kafir, wanita Islam tidak boleh dikawini lelaki kafir.<sup>2</sup>

Menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh orang, salah satu di antaranya adalah ahli dua agama

---

<sup>1</sup>Syekh Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm.293

<sup>2</sup>TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan antar Mazhab*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 310.



(berlainan agama). Maka seorang Islam tidak dapat mewaris orang kafir, dan sebaliknya.<sup>3</sup>

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan al-muwarris, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarissnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan yang lain Syi'ah.

Dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

وعن اسامة بن زيد أن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (متفق عليه)<sup>4</sup>

Artinya: Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (Muttafaq 'alaih).

Hadits riwayat Turmuzi sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, hlm. 6.

<sup>4</sup>Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 98

وعن عبد الله بن عمر رض الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين رواه احمد والاربعة والترمذى وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائى حديث أسامة بهذا اللفظ<sup>5</sup>

Artinya: "dan dari Abdullah bin Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama (HR.Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nasa'i juga meriwayatkan dari Usamah bin Zaid).

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum ayat 141 surat al-Nisa' sebagai berikut:

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin) (QS. al-Nisa: 141).<sup>6</sup>

Nabi SAW. sendiri mempraktikkan pembagian warisan, di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW. meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi SAW. harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu 'Ali dan Ja'far, oleh beliau tidak diberi bagian.

---

<sup>5</sup>Al- Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as-Salmi at-Turmuzy, *Sunan at-Turmuzy*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931, 137. Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtima'iyah tth, hlm. 196.

<sup>6</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986, hlm. 103

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat muwarris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mati. Dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama.

Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya, karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi.

Pendapat Imam Ahmad di atas sejalan dengan pendapat golongan mazhab Syi'ah Imamiyah. Alasan yang dikemukakannya adalah, sebelum harta dibagi, harta-harta tersebut belum menjadi hak ahli waris yang pada saat kematian muwarris telah memeluk Islam. Namun pendapat terakhir ini, agaknya sulit diikuti, karena besar kemungkinan, kecenderungan seseorang untuk menguasai harta warisan akan dengan mudah mengalahkan agama yang dipeluknya, dan menyalahgunakan agama Islam sebagai upaya memperoleh harta warisan. Walaupun pada saat kematian muwarris, ia masih berstatus sebagai kafir, sebelum harta dibagi ia dapat menyatakan diri memeluk Islam untuk tujuan mendapatkan warisan.

Mayoritas Ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.<sup>7</sup>

Pemahaman yang dapat diambil dari praktik pembagian warisan Abu Thalib, adalah bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tidak menjadi penghalang saling mewarisi. Hakikatnya, antara agama-agama selain Islam adalah satu, yaitu agama yang sesat. Demikian pendapat Ulama-ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Abu Dawud al-Zahiry. Dasar hukumnya adalah Firman Allah SWT:

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

Artinya: ...maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan... (QS.Yunus-.32).

Imam Malik dan Ahmad mengemukakan pendapat bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tetap menjadi penghalang mewarisi. Dasarnya adalah, bahwa masing-masing agama mereka mempunyai syari'at sendiri-sendiri, seperti diisyaratkan Firman Allah SWT:

لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Bagi setiap umat di antara kamu, Kami jadikan suatu peraturan dan tata cam (sendiri-sendiri)... (QS. al-Maidah: 48).

Mengenai orang murtad orang yang keluar dari agama Islam, para Ulama memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini

---

<sup>7</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, hlm. 12

karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali (*shilah*) syari'ah dan melakukan kejahatan agama.<sup>8</sup> Karena itu, meskipun dalam isyarat al-Qur'an bahwa mereka dikategorikan sebagai orang kafir, para Ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapa pun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke baitul-mal sebagai harta *fai'* atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum.

Imam Hanafi memberi ketentuan, apabila orang yang murtad memiliki harta yang diperoleh ketika dia masih memeluk Islam, dapat diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim. Selebihnya, dimasukkan ke baitul-mal. Sudah barang tentu hal ini dapat dilakukan jika dapat dipisah-pisahkan harta mana yang diperoleh ketika masih Muslim dan mana yang diperolehnya setelah murtad. Apabila tidak bisa dipisah-pisahkan, maka sebaiknya semua kekayaannya dimasukkan ke baitul-mal.

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* menerangkan tentang waris beda agama secara rinci yang uraiannya dapat diikuti di bawah ini:<sup>9</sup> Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabiin serta fuqaha Amshar berpendapat bahwa orang muslim tidak mewaris orang kafir karena adanya hadis sahih tersebut.

Dalam pada itu, Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiyah dari kalangan sahabat, serta Sa'id bin al-Musayyab dan Masruq dari kalangan tabiin, dan

---

<sup>8</sup> Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981, hlm. 16

<sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 413 – 417.

segolongan fuqaha berpendapat bahwa orang muslim itu mewaris orang kafir. Dalam kaitan ini mereka menyamakan hal itu dengan wanita-wanita orang kafir yang boleh dikawini. Mereka berkata, "Kami boleh mengawini wanita mereka, tetapi kami tidak diperbolehkan mengawinkan mereka dengan wanita kami, maka begitu halnya dengan hal warisan." Dan dalam hal ini mereka meriwayatkan hadis yang musnad. Abu Umar berkata, "Pendapat tersebut tidak kuat bagi jumhur fuqaha." Mereka juga menyamakan kepewarisan dari orang kafir tersebut dengan qishash darah yang tidak seimbang.

Adapun mengenai harta orang murtad, jumhur fuqaha Hijaz berpendapat bahwa harta orang murtad jika ia terbunuh atau mati secara wajar untuk kaum muslim, sedang keluarganya tidak mewarisinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i serta dipegangi oleh Zaid r.a. dari kalangan sahabat.<sup>10</sup>

Dalam pada itu, Abu Hanifah, ats-Tsauri, jumhur fuqaha Kufah, dan kebanyakan fuqaha Basrah berpendapat bahwa orang murtad itu diwarisi oleh para pewarisnya yang memeluk agama Islam. Ini adalah pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud r.a. dari kalangan sahabat.

Fuqaha golongan pertama berpegangan pada keumuman hadis. Sedang fuqaha golongan kedua berpegangan dengan mentakhsiskan keumuman hadis dengan qiyas. Qiyas mereka dalam hal ini ialah hubungan kekerabatan para pewaris muslim itu lebih utama dibanding kaum muslim, karena pewaris

---

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm.86

tersebut mengumpulkan dua sebab, yakni Islam dan kekerabatan, sementara kaum muslim hanya mempunyai satu sebab saja, yaitu Islam.<sup>11</sup>

Nampaknya golongan kedua ini menguatkan pendapat bahwa hukum Islam masih diberlakukan terhadap harta orang murtad, dengan bukti hartanya tidak diambil seketika, tetapi ditunggu sampai ia mati. Karena itu, hidupnya masih dianggap dalam rangka memelihara hartanya tetap berada dalam hak miliknya. Itu berarti hartanya harus dihormati sesuai ketentuan hukum Islam. Karena itu, hartanya tidak boleh ditetapkan atas dasar kemurtadan, berbeda dengan harta orang kafir.

Menurut Syafi'i dan yang lain, qadla' salat yang ditinggalkan selama murtad dapat diterima, jika ia bertobat dari murtadnya. Golongan lain mengatakan, hartanya itu ditangguhkan dulu, karena masih kehormatan Islam. Dengan penangguhan itu diharapkan ia mau kembali kepada Islam dan penguasaan kaum muslim terhadap hartanya itu, tidak melalui jalan warisan. Sementara itu, ada segolongan fuqaha yang nylenah pendapatnya, dengan mengatakan, begitu terjadi kemurtadan, hartanya itu untuk kaum muslim. Menurut dugaan saya, Asyhab adalah salah seorang yang berpendapat demikian.

Adapun tentang warisan antar agama, bahwa fuqaha sependapat untuk memberikan warisan kepada pemeluk agama yang satu, sebagian mereka atas

---

<sup>11</sup>*Ibid*

sebagian yang lain. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pewarisan antar agama yang berbeda-beda.<sup>12</sup>

Malik dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa pemeluk agama yang berbeda-beda tidak saling mewaris, seperti orang Yahudi dan Nasrani. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan segolongan fuqaha.

Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, ats-Tsauri, Dawud dan yang lain-lain berpendapat, bahwa semua orang kafir saling mewaris.

Sementara itu, Syuraih, Ibnu Abi Laila, dan segolongan fuqaha membagi agama-agama yang tidak saling mewaris menjadi tiga golongan. Orang-orang Nasrani, Yahudi, dan Sabi'in adalah satu agama; orang-orang Majusi dan mereka yang tidak mempunyai kitab suci adalah satu agama; dan orang-orang Islam adalah satu agama pula. Dari Ibnu Abi Laila diriwayatkan bahwa ia berpendapat, seperti pendapat Malik.<sup>13</sup>

Malik dan fuqaha yang sependapat dengannya berpegangan pada hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Sedang ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpegangan pada sabda Nabi Saw:

وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (متفق عليه)<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 87

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd, *op. cit*, hlm. 414

<sup>14</sup>Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 98



Artinya: Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (Muttafaq 'alaih).

Berdasarkan dalil *khithab mafhum* hadis tersebut adalah orang muslim itu dapat mewaris sesama orang muslim, dan orang kafir dapat mewaris sesama orang kafir.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pembagian waris yang antara anggota keluarga yang berbeda agama di Kelurahan Kalipancur itu sangat bertentangan dengan hukum Islam

## **B. Analisis Kerangka Pikir Pembagian Harta Warisan**

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, terletak di sebelah barat Kota Semarang yang berjarak 12,5 Km dari ibukota Propinsi. Kondisi ini telah membuka peluang masuknya segala bentuk budaya serta memperluas pergaulan dan asimilasi serta akulturasi nilai-nilai budaya dari luar serta agama. Atas dasar itu ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian waris beda keluarga beda agama di antaranya:

### **1. Faktor pendidikan.**

Di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan bahwa pendidikan yang ditempuh oleh anak, remaja dan pemuda sangat beragamam, namun pada umumnya mereka diberi kebebasan untuk memasuki sekolah-sekolah yang sesuai dengan minat anak. Pada umumnya mereka lebih banyak masuk sekolah-sekolah umum dengan pertimbangan bahwa lulusan dari

sekolah umum lebih besar peluangnya untuk bisa diterima di perusahaan-perusahaan dibandingkan dengan sekolah-sekolah diniyah.<sup>15</sup>

## 2. Faktor budaya.

Masuknya budaya-budaya asing sangat mudah diapresiasi dan ternyata budaya asing lebih dominan menjadi pilihan mereka.<sup>16</sup>

## 3. Faktor agama.

Sikap keberagaman mereka sangat terbuka dan membuang jauh-jauh sikap fanatisme beragama.<sup>17</sup>

Menurut peneliti, pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam mewarnai kehidupan seseorang karena pendidikan merupakan sebuah upaya untuk mencerdaskan seseorang dan merubah perilakunya. Pendidikan yang baik yang lebih banyak nuansa agamanya terutama aspek akhlakul karimah akan membangun karakter dan pribadi seseorang. Jika diperhatikan banyak pakar pendidikan yang merumuskan tentang apa pendidikan itu misalnya, secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata "pendidikan" berasal dari kata "didik" yang berarti proses pengubah tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pendidikan dan latihan.<sup>18</sup> Pendidikan sering diterjemahkan orang dengan paedagogi. Pada Yunani Kuno seorang

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Nurhadi selaku sesepuh warga Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, wawancara dilakukan tgl. 22 Januari 2007

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Sudirman selaku sesepuh warga Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, wawancara dilakukan tgl. 23 Januari 2007

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Sofi selaku sesepuh warga Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, wawancara dilakukan tgl. 23 Januari 2007

<sup>18</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 263.

anak yang pergi dan pulang sekolah diantar seorang pelayan; pelayan tersebut biasa disebut *paedagogos*, penuntun anak.<sup>19</sup> Dengan demikian Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedagogie* yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata *education* yang berarti pengembangan atau bimbingan.<sup>20</sup>

Dalam bahasa Arab istilah ini dikenal dengan kata *tarbiyah* dengan kata kerjanya *rabba-yurabbi-tarbiyatan* yang berarti mengasuh, mendidik, dan memelihara.<sup>21</sup> Menurut Abdur Rahman An Nahlawi, kata *tarbiyah* ditemukan dalam tiga akar kata yaitu: *pertama*, *raba – yarbu*, yang artinya bertambah dan tumbuh. Ini di dasarkan kepada surat Ar Rum: 39. *Kedua*, *rabiya-yarba*,' dengan *wazn* (bentuk) *khafiya yakhfa*, artinya menjadi besar. *Ketiga*, *rabba-yarubbu*, dengan *wazn* (bentuk) *madda yamuddu*, berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga dan memelihara.<sup>22</sup>

Muhammad Fuad Abd al-Baqy telah menginformasikan bahwa di dalam al-Qur'an kata "*tarbiyah*" dengan berbagai kata serumpun dengannya diulang sebanyak lebih dari 872 kali.<sup>23</sup> Kata tersebut berakar pada kata *rabb*. Kata ini sebagaimana dijelaskan oleh Raghīb al-

<sup>19</sup>Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993, hlm. 15.

<sup>20</sup>Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 2.

<sup>21</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 504.

<sup>22</sup>Abdurrahman an-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1980, hlm. 31.

<sup>23</sup>Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, hlm. 285 – 299.

Ashfahany, pada mulanya berarti *al-Tarbiyah* yaitu insya' al-sya'i halan ila halin ila had taman yang artinya mengembangkan atau menumbuhkan sesuatu setahap demi setahap sampai pada batas yang sempurna.<sup>24</sup>

Secara terminologi, kata "pendidikan" dirumuskan oleh para pakar dalam berbagai pengertian yang berbeda, misalnya Ahmad D. Marimba memberi pengertian pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.<sup>25</sup> Definisi ini selanjutnya dinilai oleh Ahmad Tafsir sebagai definisi yang belum mencakup semua yang kita kenal sebagai pendidikan. Definisi itu cukup memadai bila kita membatasi pendidikan hanya pada pengaruh seseorang kepada orang lain, dengan sengaja (sadar). Pendidikan oleh diri sendiri dan oleh lingkungan, tampak belum tercakup oleh batasan pendidikan yang diberikan oleh Ahmad D. Marimba tersebut. Namun demikian, Ahmad Tafsir lebih lanjut mengatakan bahwa pengertian mana yang anda akan ambil, boleh saja, terserah kepada anda.<sup>26</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut dijumpai pula formulasi pendidikan yang diajukan Soegarda Poerbakawaca, bahwa pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu

---

<sup>24</sup>Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Nedia Peratama, 2005, hlm. 6.

<sup>25</sup>Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1998, hlm. 20.

<sup>26</sup>Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 23.

memikul tanggung jawab moral dari segala perbuatannya.<sup>27</sup> Dengan merujuk pada rumusan Soegarda Poerbakawaca, maka Zuhairini mendefinisikan pendidikan sebagai urusan manusia (dalam arti manusia dewasa) untuk memanusiakan (manusia yang belum dewasa) manusia (dewasa).<sup>28</sup> Syaiful Bahri Djamarah, memberi pengertian juga, pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia. Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, maka dalam pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan.<sup>29</sup> Menurut Abdul Rahman Saleh, pendidikan adalah usaha secara sadar yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk menyiapkan peserta didik menuju kedewasaan, berkecakapan tinggi, berkepribadian/berakhlak mulia dan kecerdasan berpikir melalui bimbingan dan latihan.<sup>30</sup> Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

---

<sup>27</sup>Soegarda Poerbakawaca, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1981, hlm. 257.

<sup>28</sup>Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 120.

<sup>29</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Rineka cipta, 200, hlm. 22.

<sup>30</sup>Abdul Rachman Shaleh, *op. cit*, hlm. 3.

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>31</sup>

Hasan Langgulung dalam bukunya: *Asas-Asas Pendidikan Islam* menyatakan:

Pendidikan sebenarnya dapat ditinjau dari dua segi. *Pertama* dari sudut pandangan masyarakat, dan *kedua* dari segi pandangan individu. Dari segi pandangan masyarakat, pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda, agar hidup masyarakat tetap berkelanjutan. Atau dengan kata lain, masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke generasi agar identitas masyarakat tersebut tetap terpelihara. Dilihat dengan kaca mata individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi. Ada lagi pandangan ketiga tentang pendidikan, yaitu yang sekaligus memandang dari segi masyarakat atau alam jagat dan dari segi individu. Dengan kata lain pendidikan dipandang sekaligus sebagai pewarisan kebudayaan dan pengembangan potensi-potensi.<sup>32</sup>

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk mewujudkan manusia seutuhnya dengan selalu mengembangkan potensi yang ada pada setiap anak didik. Semuanya bermuara kepada manusia, sebagai suatu proses pertumbuhan dan perkembangan secara wajar dalam masyarakat yang berbudaya. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pendidikan adalah suatu proses alih generasi, yang mampu mengadakan transformasi nilai-nilai ilmu pengetahuan dan budaya kepada generasi berikutnya agar dapat menatap hari esok yang lebih baik.

Melihat pendidikan yang ditempuh oleh anak remaja pemuda di kelurahan Kalipancur menunjukkan adanya kebebasan yang terlalu bebas

---

<sup>31</sup>Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, Jakarta: BP.Cipta Jaya, 2003, hlm. 4. (DEPDIKNAS, 2003: 163)

<sup>32</sup>Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 2000, hlm. 1-2

sehingga anak lebih memilih pendidikan yang lebih banyak menjanjikan untuk memasuki lapangan pekerjaan. Dalam perspektif mereka pendidikan umum atau yang bernuansa barat lebih siap pakai dan lebih mampu berkompetisi di tengah–tengah kehidupan yang makin kompleks. Kesan yang terbangun pada mereka adalah pendidikan agama kurang mempunyai masa depan yang dapat diandalkan dan dalam pandangan mereka pendidikan yang bernuansa diniyah hanya mampu memecahkan masalah akhirat dan tidak mampu memecahkan masalah–masalah duniawi. Dengan terbangunnya kesan tersebut, mereka tidak lagi menggunakan filter pada waktu membaca buku–buku orientalis yang pada sebagiannya menaburkan racun dan penggeseran nilai–nilai akidah. Dari sini peneliti melihat sangat mudahnya bagi mereka berpindah–pindah agama karena pendidikan yang ia tempuh terlalu sekuler.

Dari aspek budaya beberapa keluarga di kelurahan Kalipancur (20 keluarga ) terlalu mendewa–dewakan beberapa budaya yang diimpor dari luar. Peneliti berpendapat penyerapan budaya tanpa menggunakan filter tidak hanya berimplikasi pada perilaku keseharian melainkan juga bisa berimbas pada dimensi agama. Agama akhirnya dipersamakan dengan budaya yang merupakan hasil cipta dan karsa manusia. Problem inilah yang kemudian memunculkan kesan bahwa jika kebudayaan itu mempunyai nilai manfaat untuk manusia maka budaya mempunyai kesakralan yang sama dengan agama.

Dari aspek agama, sikap keberagaman yang melekat pada 0 keluarga yang berbeda agama itu menganut asas keterbukaan yang berlebihan dan toleransi yang tanpa batas. Menurut peneliti kerukunan mereka dalam beragama bukan disebabkan agamanya melainkan sikap mereka yang memandang bahwa semua agama itu sama dan karena sama maka tidak ada satu agama pun yang dapat mengklaim sebagai agama yang paling super.

Agama bagi mereka merupakan sekumpulan aturan yang nilai kebenarannya tidak berbeda dengan agama-agama lain. Bagi mereka semua penganut agama mempunyai peluang untuk masuk surga dan neraka, hal itu tergantung dari amal sholihnya. Menurut peneliti sikap yang mempersamakan semua agama menunjukkan telah bergesernya nilai –nilai akidah dan syari'ah. Pergeseran ini akan terus berkembang dan pada titik puncaknya bisa saja orang itu melepaskan agama dari kehidupannya.

Berdasarkan analisis di atas bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena beda agama di kelurahan Kalipancur menunjukkan fenomena yang membahayakan sehingga kaidah-kaidah atau norma-norma hukum agama terutama hukum islam menjadi tumpul dan tidak berdaya dalam mengendalikan corak berpikir yang terlalu sekuler dan liberal.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan memperhatikan uraian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian di kelurahan Kalipancur, berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu yang berjumlah 20 keluarga, dijumpai adanya keluarga yang antara anak dengan orang tuanya berbeda agama, yang satu Islam dan lainnya beragama Kristen, juga ada Hindu dan Budha. Satu hal yang menarik dari kehidupan keluarga itu yaitu pada waktu orang tua dari keluarga itu meninggal dunia ternyata ada pembagian waris dan waris itu di bagi-bagi tanpa membedakan agama. Berdasarkan uraian di atas, bahwa pembagian waris yang antara anggota keluarga yang berbeda agama di Kelurahan Kalipancur itu sangat bertentangan dengan hukum Islam.
2. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian waris keluarga beda agama di antaranya: (1) Faktor pendidikan. Di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan bahwa pendidikan yang ditempuh oleh anak, remaja dan pemuda sangat beragamaan, namun pada umumnya mereka diberi kebebasan untuk memasuki sekolah-sekolah yang sesuai dengan minat anak. Pada umumnya mereka lebih banyak masuk sekolah-sekolah umum dengan pertimbangan bahwa lulusan dari sekolah umum lebih besar peluangnya untuk bisa diterima di perusahaan-perusahaan dibandingkan

dengan sekolah-sekolah diniyah. (2) Faktor budaya. Masuknya budaya-budaya asing sangat mudah diapresiasi dan ternyata budaya asing lebih dominan menjadi pilihan mereka. (3) Faktor agama. Sikap keberagaman mereka sangat terbuka dan membuang jauh-jauh sikap fanatisme beragama.

## **B. Saran-saran**

Hendaknya pembagian waris itu dengan mengacu pada pendapat para imam mazhab dan kebebasan agama tidak berarti lepas tanpa batas.

## **C. Penutup**

Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari mungkin adanya kesalahan atau kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi bila ditinjau dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya. Karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan. Akhir kata penulis mengucapkan alhamdulillah semoga tulisan di atas ada manfaatnya bagi pembaca budiman.  
*Amin ya Rab al alamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Asqalani, Al-Hafidz ibn Hajar, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah tth.
- Audah, Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, juz 1, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth.
- Bâqy, Muhammad Fuâd Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Bzn, Ter Haar, *Beginnselen en Stelsel van Het Adat Recht*, Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, "Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat", Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Dahlan, Abdul Azis, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Rineka cipta, 200.
- Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qasyim, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2001
- Hadikusumah, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni, 1980.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an*. Jakarta, Tintamas, t.th.
- Jalaluddin, Imam dan al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dar al-Fikr, t.th.

- Langgulong, Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 2000.
- M. Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Malibary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyun*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera , tth.
- Marimba, Ahmad D., *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1998.
- Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin Pustaka Amani, 1981.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera Basritama, tth.
- Muhadjir, Noeng, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim, *Sahih Muslim* juz 2, Jakarta: Dar Ihyaa' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.
- Nahlawi, Abdurrahman, *Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1980.
- Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Tijariah Kubra, Mesir, tt.h.
- Nasa'i, Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr, hadis No. 1860 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Nata, Abuddin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Nedia Peratama, 2005.
- Pitlo, A., *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1979.
- Poerbakawaca, Soegarda, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1981.
- Poerwardaminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982.

- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Pudjosubroto, R. Santoso, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964.
- Rahim, Muhammad 'Abd, *al-Muhadarat fi al-Miras al-Muqaran*, Kairo: tp, tth.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, Jakarta: raja Grafindo Persada, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rusyd, Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid Wa nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiil, 1409H/1989M.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 14, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997.
- Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M.
- Shaleh, Abdul Rachman, *Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Shiddieqy TM. Hasbi Ash, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan antar Mazhab*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001.
- , *Fiqih Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Soemanto, Wasty, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 1966.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Bandar Maju, 1995.

- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syalthut, Syekh Mahmud, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- , *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Turmuzi, Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad-Dahak as-Salmi hadis No. 1660 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, Jakarta: BP.Cipta Jaya, 2003, hlm. 4. (DEPDIKNAS, 2003: 163)
- Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986.
- Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

### **Sumber lain:**

Monografi Kelurahan Kalipancur

Wawancara dengan Bapak Arifin sebagai karyawan tanggal 20 januari 2007

Wawancara dengan Bapak fajar sebagai guru tanggal 21 januari 2007

Wawancara dengan Bapak Hasan Kurnia sebagai pengusaha tanggal 24 januari 2007

Wawancara dengan Bapak Hidayat sebagai PNS tanggal 23 januari 2007

Wawancara dengan Bapak Nurhadi selaku sesepuh warga Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, wawancara dilakukan tgl. 22 Januari 2007

Wawancara dengan Bapak Nurhadi selaku sesepuh warga Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, wawancara dilakukan tgl. 22 Januari 2007

Wawancara dengan Bapak Rohman sebagai guru tanggal 22 januari 2007

Wawancara dengan Bapak Samidjo sebagai wiraswasta tanggal 23 januari 2007

Wawancara dengan Bapak Sofi selaku sesepuh warga Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, wawancara dilakukan tgl. 23 Januari 2007

Wawancara dengan Bapak Sofi selaku sesepuh warga Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, wawancara dilakukan tgl. 23 Januari 2007

Wawancara dengan Bapak Sudirman selaku sesepuh warga Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, wawancara dilakukan tgl. 23 Januari 2007

Wawancara dengan Bapak Sudirman selaku sesepuh warga Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, wawancara dilakukan tgl. 23 Januari 2007

Wawancara dengan Bapak Tatang sebagai wiraswasta tanggal 23 januari 2007

Wawancara dengan Ibu Titik Suharni, S.H., selaku Sekertaris Lurah Kelurahan Kalipancur, wawancara dilakukan tgl. 21 Januari 2007 di Balai Desa Kelurahan Kalipancur.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Furqan Khafidli

Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 23 Desember 1981

Alamat Asal : Jl. Candi Mutiara Raya No. 1184 RT. 7, RW 7  
Pasadena Semarang

Pendidikan : - MI al-Khoiriyyah I, Semarang lulus th. 1994  
- MTs al-Khoiriyyah I Semarang lulus th. 1997  
- MAN I Semarang lulus th. 2000  
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang  
Angkatan 2000

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Muhammad Furqan Khafidli**